

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akselerasi penurunan prevalensi *stunting* melalui pendekatan *Collaborative Governance* di Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi berjalan sesuai dengan kerangka teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008). Proses kolaborasi ini memperlihatkan kekuatan sekaligus keterbatasan pada tiap elemen utama, mulai dari *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, *collaborative process*, *intermediate outcomes*, hingga *outcomes*.

Kondisi awal (*starting conditions*) menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, ketidakseragaman data, serta pengaruh narasi budaya lokal mengenai *stunting*. Namun, kondisi tersebut justru mendorong munculnya kesepakatan kolektif untuk menyamakan data dan mengintegrasikan peran lintas sektor. Dari sisi desain kelembagaan (*institutional design*), keberadaan TPPS, rembuk *stunting*, musyawarah desa, dan minilok menjadi wadah formal yang memberikan legitimasi proses deliberatif, meski efektivitasnya masih dipengaruhi oleh konsistensi tindak lanjut.

Peran kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) dijalankan oleh aktor-aktor kunci seperti Sekretaris Desa, bidan, dan KPM yang berfungsi sebagai penghubung, fasilitator teknis, dan pelaksana lapangan. Kepemimpinan ini menjaga

ritme kolaborasi, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas individu dan potensi ketidakberlanjutan akibat pergantian personel. Pada aspek *collaborative process*, praktik dialog tatap muka melalui rembuk *stunting*, minilok, dan posyandu menjadi arena deliberatif, sementara *kepercayaan (trust building)* terbangun melalui interaksi rutin dan pendekatan persuasif. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) tampak pada rutinitas teknis input data dan tindakan jemput bola, sedangkan *shared understanding* terbentuk melalui pra-laporan data dan koordinasi digital, walaupun masih menghadapi tantangan teknis dan kultural.

Hasil-hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang muncul berupa mekanisme pra-laporan, inovasi teknis seperti jemput bola dan adaptasi menu PMT, serta transparansi administrasi, menunjukkan adanya *small wins* yang memperkuat motivasi, meningkatkan kepercayaan, dan membangun akuntabilitas. Pada titik ini, kontribusi sektor swasta melalui program CSR 1–10–100 (2022) juga terlihat sebagai dukungan tambahan, meskipun bersifat terbatas dan tidak langsung. Bantuan tersebut hanya memperkuat penyediaan logistik dan PMT untuk sementara waktu, tanpa masuk ke dalam forum deliberatif maupun proses koordinasi di tingkat desa. Pada tahap akhir (*outcomes*), kolaborasi lintas sektor di Desa Sumberaji berhasil menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan. Capaian ini menegaskan bahwa upaya kolaboratif tidak hanya menghasilkan prosedur dan inovasi baru, tetapi juga berdampak nyata terhadap perubahan kondisi gizi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan *stunting* di Desa Sumberaji bertumpu pada kombinasi faktor struktural, teknis, dan kultural, di mana komitmen aktor lokal, dukungan kelembagaan,

kehadiran kepemimpinan fasilitatif, serta praktik inovasi adaptif menjadi penggerak utama keberlanjutan kolaborasi, sementara keterlibatan aktor swasta masih memerlukan penguatan agar dapat memberi dampak jangka panjang dalam proses kolaboratif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat praktik kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting*, baik di Desa Sumberaji maupun di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

1. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kader posyandu dan KPM, melalui pelatihan berkelanjutan mengenai teknik pengukuran gizi, pencatatan data, serta keterampilan komunikasi persuasif. Penguatan kapasitas ini penting agar *shared understanding* berbasis data semakin kokoh dan tidak mudah terganggu oleh keterbatasan teknis.
2. Kedua, forum formal seperti rembuk *stunting* dan musyawarah desa perlu diperkuat secara substansial. Rapat-rapat tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas administratif, tetapi harus menghasilkan keputusan dengan penanggung jawab yang jelas, tenggat waktu yang tegas, serta mekanisme monitoring pascarapat. Dengan demikian, akuntabilitas kolaborasi dapat lebih terjamin.
3. Ketiga, inovasi digital yang saat ini berbasis pada spreadsheet, WhatsApp, dan Google Form perlu ditingkatkan ke arah sistem informasi terintegrasi di

bawah koordinasi pemerintah kabupaten. Integrasi ini penting untuk mengurangi tumpang tindih pelaporan antarinstansi dan memastikan keberlanjutan koordinasi lintas sektor.

4. Keempat, dukungan Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama program *stunting* harus diarahkan pada kegiatan prioritas dengan mekanisme pengawasan partisipatif. Transparansi anggaran dapat diperkuat melalui publikasi rutin di forum desa agar meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap program.
5. Kelima, adaptasi intervensi berbasis kearifan lokal harus terus dipertahankan. Penyesuaian menu PMT sesuai preferensi anak, pendekatan budaya dalam penyuluhan, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan program. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan *top-down*, tetapi juga oleh fleksibilitas program dalam mengakomodasi kondisi lokal.
6. Keenam, penelitian ini juga menyarankan adanya penguatan regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten agar praktik kolaborasi di desa lebih terinstitusionalisasi. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, keberhasilan kolaborasi akan tetap rentan terhadap dinamika personal atau pergantian aktor. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) kolaborasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua desa.
7. Ketujuh, perluasan dan penataan peran aktor swasta. Mengingat kontribusi sektor swasta masih terbatas dan bersifat episodik melalui CSR 1–10–100,

diperlukan strategi agar keterlibatan ini lebih terstruktur. Pemerintah kabupaten dan TPPS dapat mengintegrasikan bantuan CSR ke dalam forum perencanaan desa, mensyaratkan komponen *capacity building* dalam setiap dukungan, memastikan bahwa bantuan eksternal tercatat dalam mekanisme monitoring desa. Penataan ini penting agar dukungan sektor swasta tidak hanya bersifat material jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan kolaborasi.

Akhirnya, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi peran aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*. Partisipasi aktor tambahan ini berpotensi memperluas sumber daya, memperkaya inovasi, serta memperkuat legitimasi kolaborasi.